

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2019. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia RI.
- Effendy, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence. 2018. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Goodpaster, Gary. 1995. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar – Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghaila Indonesia.
- Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Jakarta Kencana.
- Joni, Emirzon. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kebeshian, L.A. 1994. *ADR: To Be Or ... ?*, North Dakota Law Review.
- Lie, Gunardi, dkk. 2021. *Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa pada Masyarakat di Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir*. Bandung. Jakarta: Serina Untar III.
- Mudjono. 1992. *Hukum Agraria*. Yogyakarta: Yogyakarta Liberty
- Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

- Nugroho, Susanti Adi. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Patittingi, Farida. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Pide, Suriyaman Mustari. 2009. *Quo Vadis Pendaftaran Tanah*. Makassar: PUKAP-Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum dan Undang – Undang Perkebunan*. Bandung: Nusa Media.
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan Dasar – Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim H.S., Erlies S. Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sarjita. 2005. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: Tugu Jogja.
- Satjipto, Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia.
- Singaribun, Masri, Sofyan. 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemartono, Gatot P. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistyowati, Irianto, Shidart (Ed). 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, JHMP-FHUI. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarif, Elza. 2014. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan Cet. Ke- 2*. Jakarta: PT Gramedia.
- Tambunan, Naomi Helena. 2010. *Peran Lembaga dalam Penyelesaian Sengketa Tanah yang Diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi*. Depok: UI Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2009. *Ragam – Ragam Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Jakarta.
- Zalili, Winahyu Erwiningsih Fakhriyah. 2018. *Mengurai Benang Kusut Hak Ulayat*. Malang: Intelegensia Media.

### **Karya Ilmiah**

- Ahmad Gozali Bangun, Muhammad Yamin, Adil Akhyar, “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian pada Law Firm AG\_ERS, S.H.,M.H & Partner)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol.3 No.2* Juni 2022.
- Andi Faisal, “Tudang Sipulung (Tradisi Budaya Musyawarah Masyarakat Bugis)”, *Artikel*, Makassar, 2014.
- Andi Faizal Irwan, “Peran Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam Mereduksi Sengketa Pertanahan yang Diupayakan Melalui Mediasi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Yogyakarta, 2011.
- Bunga Desyana Pratami, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi (Studi di Kantor Pertanahan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2018.
- Herwandi, “Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Made Yudha Wismaya dan I Wayan Novy Purwanto, “Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

melalui Mekanisme Mediasi,” *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2018.

Nur Wahyuni, “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Batas Tanah (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2017.

Ova Maerakaca Rayiatmaja, Ana Silviana, dan Triyono, “Penyelesaian Sengketa Tanah antara Petani dengan PT Mackenzie melalui Mediasi (Studi Penyelesaian Sengketa Tanah PT Mackenzie di Kabupaten Pemasang)”, *Jurnal*, Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3, Malang, 2016.

Saidina Irhamna, Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi (Studi di Kantor Pertanahan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta), *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Malang, 2018.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Permen ATR/BTN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2022 – 2025

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)